

# MERAJUT JARINGAN DI TENGAH PERUBAHAN: KOMUNITAS EKONOMI MUSLIM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL<sup>1</sup>

Oleh: Bambang Purwanto<sup>2</sup>

## pendahuluan

Hampir seluruh ahli sependapat, sejak awal proses islamisasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan. Aktivitas ekonomi menjadi salah satu jalur utama dalam perluasan komunitas muslim di seluruh Indonesia, yang bergerak dari daerah pantai untuk membentuk pusat-pusat komunitas muslim baru di pedalaman. Pendapat ini didukung oleh kenyataan, sampai saat ini hampir sebagian besar kelompok yang menguasai sumber dan aktivitas ekonomi di alam masyarakat Indonesia terkonsentrasi di sekitar komunitas muslim yang dikenal sebagai kelompok santri. Akan tetapi secara historiografis, jarang sekali ditemukan ajaran yang mengaitkan perkembangan Islam di Indonesia dengan aspek ekonomi.

Ketika islamisasi baik secara struktural maupun kultural terhadap masyarakat di kepulauan Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat pada abad XVI, sebuah kekuatan dan nilai baru yang berasal dari Barat mulai diperkenalkan ke dalam masyarakat yang sama. Kekuatan ekonomi, kekuasaan politik, dan nilai sosio-kultural Barat termasuk agama Kristen yang telah mengalami proses pembaratan harus menghadapi kenyataan bahwa Islam menjadi kekuatan pesaing utama dalam perluasan pengaruh Barat di Indonesia. Di dalam pandangan historiografis yang konvensional, perluasan pengaruh Barat ini hanya dilihat sebagai kekuatan superior yang berhasil menghancurkan atau merugikan Islam. Akibatnya, proses islamisasi dianggap seolah-olah berhenti ketika pengaruh Barat di dalam masyarakat semakin luas. Akan tetapi berdasarkan perspektif historiografi yang lebih luas, kenyataan historis yang sebenarnya tidak sesederhana itu. Di beberapa wilayah, perluasan pengaruh Barat ternyata mendorong terjadinya proses islamisasi. Perluasan pengaruh Islam secara struktural dan kultural di daerah tersebut terjadi bersamaan dengan berkembangnya pengaruh monopoli kongsi dagang Barat atau kekuasaan kolonial. Dalam konteks ini, Islam sering diterima bukan karena kebenaran teologisnya melainkan sebagai ideologi

<sup>1</sup> Versi pertama dari tulisan ini merupakan sebagian tulisan yang terdapat dalam buku tentang Islam di Asia Tenggara yang akan diterbitkan oleh penerbit Lehtiar Baru van Hoeve.

<sup>2</sup> Staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

atau sistem nilai alternatif dan sekaligus wujud penolakan terhadap dominasi eksternal yang sedang dibangun.

Dalam upaya untuk mengungkapkan berbagai realitas historis yang berkaitan dengan respon ekonomis komunitas muslim terhadap berbagai perubahan yang terjadi atau adanya hubungan antara Islam dan ekonomi, beberapa pertanyaan akan diajukan dalam tulisan ini. Apakah Islam hanya memiliki arti sosial, kultural dan politik bagi masyarakat pada masa perkembangan pengaruh Barat semakin luas? Apakah Islam sebagai agama terpisah begitu saja dengan aktivitas ekonomi? Sejauhmanakah pengaruh berbagai perubahan di dalam masyarakat terhadap jaringan ekonomi komunitas muslim? Dalam hal apakah identitas keislaman dan struktur keagamaan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi?

## Meneruskan Tradisi di Tengah Tantangan

Perkembangan ekonomi di kepulauan Indonesia sejak akhir abad XV tidak dapat dipisahkan dengan munculnya pusat-pusat perekonomian baru di kerajaan-kerajaan lokal yang memiliki ciri keislaman yang kuat. Proses islamisasi yang berlangsung bersamaan dengan perluasan aktivitas perdagangan pada saat itu telah mampu menciptakan tidak hanya jaringan sosial-keagamaan melainkan juga jaringan ekonomi, dalam komunitas muslim di berbagai wilayah baik di kepulauan Indonesia maupun dengan wilayah di luar kepulauan Indonesia. Para pedagang atau pengusaha muslim di sepanjang Selat Madura atau pantai utara Jawa tidak hanya memiliki hubungan ekonomis, melainkan juga hubungan kekerabatan dengan para pedagang atau pengusaha di wilayah yang sama. Dalam perkembangan lebih lanjut, hubungan yang sama juga terjalin dengan para pedagang atau pengusaha di daerah pedalaman Jawa maupun di pulau-pulau lainnya, seperti Maluku dan Kalimantan. Di lain pihak, terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa para pedagang Bugis dari Sulawesi membawa kain sarung serta sutera untuk diperdagangkan sampai ke Pariaman Sumatera Barat. Selama melakukan kegiatannya, para pedagang Bugis ini biasanya tinggal di rumah pedagang setempat. Melalui hubungan seperti inilah salah satu jaringan dibentuk di dalam komunitas muslim.

Akan tetapi seperti di tempat-tempat lain di Asia Tenggara yang tidak dipengaruhi Islam, sampai abad XVII keberadaan agama Islam di kepulauan Indonesia tidak merubah secara struktural struktur dan perilaku ekonomi setempat. Aktivitas ekonomi masih terpusat pada penguasa dan negara. Proses pembentukan negara dan birokrasi di sebagian besar kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu dengan pembentukan jaringan dan kepentingan ekonomi elite. Para birokrat sekaligus menjadi perantara dan pelaku dalam aktivitas ekonomi, seperti yang terjadi pada para penghulu di Minangkabau. Kolusi antara para elite penguasa dengan pedagang asing, termasuk dengan orang Cina yang telah terbentuk sejak lama terus berlangsung. Sementara itu persaingan bisnis yang berkembang menjadi konflik antar elite yang melibatkan raja

bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, seperti yang berlangsung antara raja Banten dan anaknya. Akibatnya, kapitalisme pedagang bebas tidak terbentuk di dalam masyarakat di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia waktu itu. Kondisi itu menyulitkan kerajaan-kerajaan Islam ketika harus berkompetisi dengan kekuatan ekonomi Barat pada masa berikutnya.

Biarpun begitu, keberadaan jaringan sosial-keagamaan dan ekonomis ini sangat penting bagi kelangsungan peran komunitas muslim dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, ketika peran kerajaan lokal dalam kegiatan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan dan pengaruh kekuatan ekonomi Barat semakin berkembang sejak akhir abad XVII. Penghancuran pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa oleh kerajaan Mataram pada dekade-dekade awal abad XVII, secara langsung maupun tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi di wilayah ini pada abad-abad berikutnya. Para pedagang muslim dari Jawa yang biasanya membawa beras sampai ke Kalimantan, kehilangan daerah basis di Pulau Jawa maupun wilayah pengaruh di pulau-pulau lain.

Sementara itu, kehadiran kekuatan asing seperti Portugis di Malaka pada tahun 1511, pembentukan kongsi dagang Inggris pada tahun 1601, dan kongsi dagang Belanda VOC sejak tahun 1602, semakin mempersempit peran pedagang muslim di Nusantara. Pada awalnya, kehadiran kekuatan asing itu memang memacu munculnya pusat-pusat perekonomian baru di Nusantara. Namun dalam perkembangan kemudian, paling tidak sejak bagian kedua abad XVII, kekuatan asing tersebut terutama VOC berhasil mengambil alih satu per satu pusat-pusat perekonomian di Nusantara.

Perluasan peran ekonomis VOC sejak abad XVII ini tidak dapat dipisahkan dengan perluasan pengaruh politiknya, terutama di Pulau Jawa. Sejak membangun "Nassau Huis" sebagai tempat tinggal pertama saudagar Belanda yang menetap di Jakarta (dulu Batavia) pada tahun 1611, pengaruh politik maupun ekonomi VOC terus berkembang dengan pesat. Disamping ambisi monopolistik dari kongsi dagang Belanda ini, VOC berhasil memperluas pengaruhnya dengan mengambil keuntungan dari konflik internal yang sering terjadi di kerajaan lokal atau antar kerajaan lokal di Nusantara pada waktu itu. Keterlibatan VOC di dalam berbagai konflik itu pada satu sisi dapat membenarkan usahanya memperluas pengaruh politik sebagai sesuatu yang legal. Pada saat yang sama pengaruh ekonomi VOC semakin besar melalui penguasaan hak atas tanah atau wilayah, termasuk hak memonopoli produksi, perdagangan, tenaga kerja, serta pajak. VOC mengambilalih sumber ekonomi penguasa lokal, dan sekaligus menentukan status ekonomi mereka. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, biarpun VOC menjadi kekuatan yang dominan di Jawa, Inggris tetap menjadi pesaing utama dalam bidang ekonomi bagi orang Belanda di banyak wilayah Nusantara yang lain sampai awal abad XIX. Di lain pihak, Spanyol semakin memperkuat kedudukannya di Filipina, termasuk upaya perluasan pengaruh

ke bagian selatan yang telah lama berada di bawah pengaruh masyarakat muslim setempat. Sementara itu, Portugis tetap berkuasa di bagian timur Pulau Timor.

Dalam konteks sejarah Indonesia, perluasan pengaruh VOC ini tidak hanya menurunkan peran politik maupun ekonomi para penguasa lokal, melainkan juga secara langsung berpengaruh terhadap kemerosotan peran ekonomis penduduk bumiputera, yang didukung terutama oleh para pedagang dan pengusaha muslim santri. Peran penting para wirausahawan bumiputera muslim yang sempat berkembang pesat pada periode sebelumnya, tiba-tiba harus berhadapan dengan kompetisi yang tidak seimbang. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan kebijakan penguasa baru yang monopolistik atau lebih mengutamakan kelompok tertentu, maupun karena persoalan modal, perubahan pola produksi, dan perubahan pola pasar internasional. Proses produksi, arus barang keluar dan masuk, serta distribusi barang misalnya, ditentukan oleh VOC yang telah menguasai jalur utama dari kegiatan perekonomian. Akibatnya, mata rantai kegiatan ekonomi antar wilayah maupun lokal yang sempat dikuasai oleh para pedagang muslim menjadi terputus putus. Kekosongan ini tentu saja membuka kesempatan bagi pihak lain, terutama orang asing Barat maupun Timur mengembangkan usaha mereka, dan sekaligus menguasai sebagian besar jaringan ekonomi yang ada di Nusantara.

Berbeda dengan sebagian besar pengusaha atau pedagang muslim bumiputera, para pedagang muslim asing, terutama orang Arab dan sebagian kecil India tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan ini. Beberapa laporan tentang abad XVIII menggambarkan peran penting orang muslim dari Arab, Gujarat, dan Benggali di dalam kegiatan ekonomi di beberapa wilayah, seperti Maluku, Makassar, Surabaya, Tegal, Pekalongan, dan Palembang. Selain menjadi pedagang besar, mereka juga bertidak sebagai pedagang perantara, pengusaha transportasi, dan peminjam uang.

Akan tetapi, tekanan yang dihadapi oleh masyarakat bumiputera ini tidak serta merta menghancurkan seluruh potensi ekonomi yang ada di dalam kelompok muslim santri. Kondisi ini memang telah merubah pola penguasaan, bentuk kegiatan ekonomi mereka, maupun cakupan geografisnya, tetapi peran mereka dalam perekonomian masyarakatnya masih tetap berfungsi. Keberadaan Inggris di pantai barat Sumatera dan keterlibatan Inggris di Aceh, Riau, dan Palembang sampai awal abad XIX tidak hanya dilihat sebagai persaingan antara kongsi dagang Inggris dan Belanda melainkan juga kelanjutan peran pedagang muslim dalam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Para pedagang muslim bumiputera dan Inggris sering menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka menembus dominasi Belanda. Tidak mengherankan jika di beberapa wilayah, persaingan ekonomis ini kadang-kadang mengakibatkan pertentangan politik dan militer antara Belanda dan Inggris atau antara Belanda dengan masyarakat bumiputera yang secara langsung maupun tidak melibatkan Inggris.

Keberlanjutan peran ekonomi komunitas muslim bumiputera ini pada waktu itu memiliki beberapa bentuk, sesuai dengan latar belakang lingkungannya. Di Pulau Jawa sebagai contoh, paling tidak terdapat dua pola umum komunitas pengusaha muslim bumiputera yang terbentuk sebagai reaksi terhadap perubahan yang terjadi. Pertama, sebagian dari kelompok wirausahawan muslim terkonsentrasi dalam produksi kebutuhan primer terutama komoditi pertanian, kerajinan, dan perdagangan di daerah pedesaan. Mereka mengadopsi Islam secara langsung ke dalam lingkungannya dengan membentuk komunitas muslim santri sebagai pendukung utama.

Perkembangan historis pesantren sejak abad XVII merupakan contoh. Otoritas sosial dan politik dari para pemimpin pesantren atau para ulama di kawasan pedesaan menjadi semakin kuat, ketika kekuasaan penguasa kerajaan semakin lemah, terutama sejak abad XVIII. Seorang pemimpin pesantren atau ulama tidak hanya berlaku sebagai guru agama atau pemimpin masyarakatnya secara sosial, melainkan juga sebagai pusat dari kegiatan ekonomi komunitasnya. Para Kyai atau Nyai dan Tuan Guru biasanya orang kaya, seorang *patron* yang memiliki tanah yang luas, ternak yang banyak, atau kekayaan lainnya, yang mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada para *client* sebagai petani penggarap, buruh, atau *penggaduh* yang sekaligus bertindak sebagai santri. Laporan tentang masa VOC misalnya menyebutkan, para pemimpin pesantren di Jawa Timur, selain menguasai lahan pertanian yang luas juga mengusahakan tambak ikan dan melakukan kegiatan perdagangan. Para pemimpin pesantren ini biasanya membentuk hubungan kekerabatan dengan pemimpin pesantren di wilayah lainnya. Hasilnya terbentuk jaringan kekerabatan, yang tidak hanya memiliki fungsi sosial dan keagamaan melainkan juga fungsi ekonomis yang sangat kuat. Melalui jaringan inilah akhirnya berbagai kegiatan ekonomis berlangsung, yang sekaligus mempertahankan keberlanjutan peran ekonomis kelompok ini di dalam masyarakat.

Kedua, komunitas wirausahawan muslim sebagian besar terkonsentrasi di sekitar pasar, pelabuhan, unit-unit produksi barang kerajinan atau industri kecil, dan pusat pemerintahan di daerah perkotaan. Kehancuran perdagangan antar pulau bumiputera di kota-kota pantai utara Jawa telah menyebabkan mereka terkonsentrasi pada usaha tertentu di sekitar pasar lokal dalam skala yang lebih kecil, atau melakukan mobilitas ke daerah pedalaman untuk membentuk komunitas baru wirausahawan muslim yang memiliki identitas keislaman yang kuat. Hasilnya, fenomena *Kampung Sudagaran* sebagai pemukiman para wirausahawan muslim santri di sekitar pasar menyebar secara luas sampai ke kota-kota kecil di Pulau Jawa. Dalam perkembangan kemudian, terjadi interaksi antara kelompok ini dengan kelompok muslim setempat. Satu hal yang sangat menarik adalah ketika tercipta hubungan antara kelompok wirausahawan muslim dengan kelompok pelaku ekonomi setempat, seperti para perajin yang sebelumnya menjadi bagian dari struktur kekuasaan tradisional. Hubungan ini menciptakan komunitas wirausahawan muslim santri yang lebih luas dalam arti jenis

usaha ekonominya maupun cakupan geografisnya, seperti yang terlihat di daerah pedalaman seperti Tasikmalaya, Garut, Solo, Klaten, Yogyakarta, di samping Pekalongan, Jepara, atau Gresik.

Kedua kelompok yang terbagi dalam dua pola umum ini dalam banyak hal dihubungkan oleh berbagai kepentingan yang sama, biarpun terdapat perbedaan antara satu kelompok dengan yang lain. Hubungan tidak hanya terjadi dalam kelompok dengan pola yang sama melainkan juga antara kelompok dengan pola yang berbeda. Hal inilah yang memungkinkan terciptanya keluarga-keluarga usahawan muslim bumiputera dengan bentuk usaha yang beragam dalam cakupan geografis yang luas. Para pedagang tidak hanya muncul dalam komunitas muslim di perkotaan, melainkan juga terdapat di dalam komunitas yang berada di pedesaan. Hanya, kedua kelompok ini sering dibedakan dalam jenis barang utama yang diperdagangkan.

Disamping hubungan kekerabatan dan keagamaan, mobilitas rutin yang terjadi di dalam komunitas muslim sendiri dalam rangka pendidikan maupun ekonomi seperti yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, menimbulkan ikatan sosial maupun ekonomis yang lebih luas. Jaringan ini menjadi semakin luas lagi karena mobilitas antar wilayah para wirausahawan muslim tidak berhenti, biarpun terjadi perluasan dominasi politik dan ekonomi asing di Indonesia pada saat yang sama. Ketika kelompok muslim dari berbagai tempat di Pulau Jawa melakukan mobilitas ke wilayah lain seperti ke Semenanjung Melayu atau sebaliknya mereka yang berasal dari pulau-pulau lain datang ke Pulau Jawa, sehingga suatu jaringan ekonomi yang lebih luas lagi terbentuk.

Selain itu, perjalanan haji atau upaya menuntut ilmu yang dilakukan oleh berbagai kelompok muslim di Nusantara ke Asia Barat dan kemudian juga ke Afrika Utara, sejak awal memiliki fungsi yang penting dalam pembentukan jaringan ekonomis di samping jaringan sosial dan keagamaan. Mereka menjadi agen yang penting dalam pengenalan berbagai jenis tanaman perdagangan baru maupun sebagai pedagang perantara.

### Merespon Kesempatan Ekonomi Baru

Memasuki abad XIX, kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan sekaligus menandai terbentuknya secara formal pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah disela oleh pemerintah Daendels dan Raffles pada dua dekade pertama abad XIX sebagai akibat dari pertikaian politik di Eropa, kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sementara itu, pemerintah kolonial Portugis tetap berkuasa di bagian timur dari Pulau Timor. Seperti juga VOC, pemerintah Hindia Belanda juga berusaha terus memperluas kekuasaan politik maupun ekonominya. Namun berbeda dengan VOC, perhatian pemerintah Hindia Belanda tidak hanya terbatas pada Pulau Jawa melainkan juga melakukan perluasan pengaruh politik maupun ekonomi ke pulau-pulau lainnya.

Secara politik, perluasan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda difokuskan pada pembentukan *Pax Neerlandica* di Nusantara. Dalam usaha mewujudkan hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda secara terus menerus melakukan intervensi militer dan politik. Akibatnya, peperangan dengan penduduk bumiputera, seperti Perang Palembang, Perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Banjar, Perang Jambi, dan Perang Tondano terjadi.

Perluasan kekuasaan politik ini pada satu sisi berdampak terhadap berakhimya pengaruh politik dan ekonomi penguasa lokal, yang sebagian besar memiliki ciri keislaman yang kuat. Namun di sisi yang lain, di samping adanya usaha pemerintah kolonial untuk mendominasi sumber ekonomi, perubahan yang terjadi juga membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas kepada penduduk bumiputera sehubungan dengan terciptanya ekonomi pasar.

Sebuah pola ekonomi baru terbentuk, di tengah-tengah pola lama yang masih terus berlangsung di dalam komunitas wirausahawan muslim bumiputera. Sementara itu sebagai catatan yang perlu diperhatikan dan memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi, bersamaan dengan perluasan pengaruh kolonialisme Belanda terjadi proses islamisasi yang sangat pesat di banyak wilayah di Nusantara pada abad XIX. Kajian tentang pemuka agama Islam, seperti peran penghulu dan kyai pada tingkat lokal, secara jelas menunjukkan bahwa pada periode ini tidak hanya terjadi pembentukan komunitas Kristen di wilayah Nusantara melainkan juga terjadi proses islamisasi dalam arti yang luas.

Di tengah-tengah perubahan sosial dan politik itu, kegiatan ekonomi penduduk kepulauan Indonesia mengalami perubahan yang besar. Di Pulau Sumatera, terjadi perubahan yang berhubungan dengan perluasan produksi serta perdagangan komoditi ekspor, terutama kopi dan lada. Perubahan ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan yang telah terjadi pada periode sebelumnya, terutama sejak akhir abad XVIII. Sumatera Barat menjadi daerah penghasil kopi *Arabica* yang besar sejak akhir abad XVIII, setelah para jemaah haji membawanya ke dataran tinggi Minangkabau pada abad sebelumnya maupun sebagai dampak dari aktivitas ekonomi para pedagang Amerika dan Inggris. Pada tahun 1790, pengapalan pertama kopi yang dihasilkan penduduk Sumatera Barat ke Amerika Serikat dilakukan dari pelabuhan Padang. Akibatnya, penduduk mulai tidak lagi hanya tergantung pada emas dan padi sebagai sumber ekonomi. Pada saat yang sama, perdagangan lokal dan antar wilayah di dataran tinggi Minangkabau berkembang dengan pesat. Hubungan ekonomi antara wilayah *darek* di pedalaman yang menghasilkan kopi dengan *rantau* yang merupakan pelabuhan menjadi lebih terbuka, dan semakin berkembang setelah Perang Paderi berakhir. Keadaan yang serupa dapat dilihat juga di daerah penghasil kopi di Kerinci dan Rejang, atau di daerah penghasil lada di Lampung, Palembang, Siak, dan Aceh.

Transaksi perdagangan komoditi ekspor tersebut maupun pemenuhan barang kebutuhan bagi para petani jelas melibatkan para pedagang lokal. Para pedagang

Minangkabau tidak hanya terbatas melakukan kegiatan di wilayah Sumatera Barat melainkan juga sampai ke wilayah Sibolga, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, Riau, dan bahkan Semenanjung Melayu. Kegiatan serupa dilakukan oleh para pedagang Banjar, yang banyak ditemui di Pulau Jawa selain di Kalimantan. Kisah hidup saudagar Muhammad Saleh gelar Datuk Orang Kaya Besar menunjukkan peran pedagang Minangkabau dalam perdagangan di dalam maupun di luar wilayahnya. Keberhasilan salah seorang saudagar besar di Minangkabau pada akhir abad XIX dan awal abad XX ini tidak lepas dari kemampuannya memahami situasi ekonomi yang ada di pedalaman dengan situasi yang ada di luar. Ia tetap memiliki usaha di Padang Panjang, sementara itu kegiatan perdagangan dengan Pariaman, Padang, dan Sibolga terus berlangsung. Di samping itu, para pedagang muslim bumiputera dari Palembang juga sangat berperan dalam perdagangan di pusat produksi lada di daerah perbatasan Palembang dengan Lampung dan Lampung Utara. Mereka memanfaatkan Sungai Tulangbawang untuk membawa barang dagangan ke dan dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa, seperti Tegal, Cirebon, dan Semarang. Sebagian dari para pedagang yang berasal dari berbagai tempat itu bahkan telah membentuk pemukiman baru di daerah-daerah tempat mereka melakukan kegiatan perdagangan, sebagai komunitas yang menetap.

Perkembangan ekonomi yang pesat ini juga membuka kesempatan terjadinya mobilitas sosial di kalangan penduduk, terutama yang berhubungan dengan menunaikan ibadah haji ke Mekah maupun kesempatan pendidikan lanjutan di berbagai pusat pengajaran Islam di Indonesia dan di luar negeri pada saat itu. Perbaikan kondisi ekonomi maupun peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi terutama sejak pertengahan abad XIX, lebih memudahkan sebagian dari penduduk melakukan ibadah haji ke Mekah.

Sebagai kenyataan sosial, persoalan haji tidak hanya menyangkut ibadah keagamaan. Selain proses pelaksanaan ibadah haji memberikan kesempatan ekonomis, gelar haji juga menimbulkan perubahan status sosial dan kesempatan ekonomi yang lebih luas kepada individu atau kelompok yang tersangkut di dalamnya. Kenaikan status sosial yang berhubungan dengan gelar haji ini membuka kesempatan kepada para haji untuk juga mendominasi kegiatan ekonomi di lingkungannya. Para haji yang sebelumnya telah terkuras atau kehilangan sumber ekonominya dalam proses pelaksanaan ibadah haji, segera dengan mudah mendapatkan kembali kesempatan ekonomi itu karena kepercayaan masyarakat yang dihubungkan dengan otoritas sosial-keagamaan mereka. Selain itu, jaringan sosial maupun ekonomi yang sempat dibentuk dalam perjalanan pelaksanaan ibadah haji juga lebih mempermudah para haji ini memperluas kegiatan ekonominya. Tidak mengherankan jika banyak penduduk bumiputera yang berhasil secara ekonomi dihubungkan dengan keberadaan kelompok haji ini, yang sering dianggap sebagai muslim santri kelas menengah pada masa kolonial. Ironisnya, di samping terkenal sebagai pedagang yang sukses, kelompok haji



ini sering juga dihubungkan dengan praktek peminjaman uang dengan bunga yang tinggi.

Gerakan revivalisme Islam yang terjadi di Sumatera Barat pada awal abad XIX juga tidak dapat dipisahkan dengan perubahan ekonomi penduduk pada saat itu. Revivalisme Islam pada awal abad XIX memang mengakibatkan terjadinya konflik internal yang dilatarbelakangi persaingan politik, kepentingan ekonomis, maupun perbedaan persepsi sosial-keagamaan. Suatu keadaan yang akhirnya secara tidak langsung membenarkan intervensi militer Belanda ke wilayah Minangkabau. Namun, revivalisme Islam ini juga yang menimbulkan "modernisasi" ekonomi Minangkabau atau revolusi komersial. Akibatnya, muncul komunitas masyarakat muslim Minangkabau yang mampu bersaing dengan kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Intervensi perusahaan dagang Belanda *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM) dalam produksi dan perdagangan kopi menjelang pertengahan abad XIX harus menghadapi kendala yang tidak kecil. Perusahaan Belanda itu harus bersaing dengan para pembeli lokal, terutama dari Padang dan Pariaman yang didukung oleh para pedagang muslim santri. Akibatnya, NHM tidak berhasil membeli kopi untuk pemerintah pada tahun 1840 dan 1841. Padahal, perdagangan kopi rakyat oleh para pedagang lokal pada saat itu masih terus berlangsung seperti biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sebuah komunitas wirausahawan muslim santri tetap bertahan di tengah persaingan dan tekanan.

Biarpun dalam bentuk yang berbeda, masalah yang menyangkut perkembangan ekonomi lada di Aceh pada abad XIX memiliki dimensi yang hampir sama. Perkembangan produksi lada di Aceh Timur pada waktu itu tidak hanya menimbulkan perubahan kualitas hidup, kesempatan ekonomi baru, dan kelompok wirausahawan muslim bumiputera yang kuat, melainkan juga pertentangan internal yang menyangkut persaingan ekonomis, politik, maupun perbedaan persepsi sosial-keagamaan. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari perluasan kepentingan pemerintah Hindia Belanda di Aceh. Akibatnya, perang Aceh tidak hanya menyangkut perang melawan orang kafir melainkan juga terdapat dimensi pertentangan di dalam, yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Hindia Belanda. Konflik politik internal di Aceh Timur misalnya, tidak dapat dipisahkan dari persaingan antara uleebalang dan ulama dalam produksi dan perdagangan lada yang menjadi sumber ekonomi penting daerah tersebut.

Perubahan ekonomis juga terjadi sejak keruntuhan Kasultanan Palembang pada dekade ketiga abad XIX, menyusul intervensi militer Belanda ke daerah ini. Di samping memperluas pengaruh ekonomis penguasa kolonial Belanda maupun para pedagang serta pengusaha asing di wilayah ini, keruntuhan Kasultanan Palembang membuka kesempatan ekonomi baru kepada penduduk bumiputera. Proses produksi, pemasaran, dan distribusi yang sebelumnya dijalankan melalui struktur birokrasi tradisional telah diganti oleh sistem pasar. Kondisi ini membuka kesempatan kepada

komunitas yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, sesuatu yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil elit lokal pada masa sebelumnya. Hal ini berarti komunitas pengusaha dan pedagang bumiputera yang lebih kuat terbentuk.

Pada tahap awal, sebagian besar dari para wirausahawan bumiputera ini banyak yang berasal dari kelompok elit lokal. Pengalaman para elit lokal pada masa sebelumnya memberi kesempatan kepada mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi ini. Namun, dalam periode kemudian muncul para pedagang bebas yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda-beda. Selain itu, tekanan ekonomi yang selama ini dilakukan oleh penguasa politik di daerah *hilir* terhadap masyarakat *hulu* telah berakhir. Keadaan ini memberi kesempatan yang lebih luas bagi para petani *hulu* dalam proses produksi, maupun bagi para pedagang *hulu* untuk membawa barang dagangannya. Sebelumnya, para pedagang *hulu* sering harus mencari jalur alternatif untuk memperoleh nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi barang mereka, karena akses ke pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan di daerah *hilir* dibatasi oleh berbagai aturan yang memberatkan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika para pengusaha dan pedagang bumiputera memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di wilayah ini, di samping orang Cina dan Arab pada masa kemudian, paling tidak sepanjang abad XIX dan awal abad XX.

Intervensi militer yang dilakukan oleh Belanda di berbagai wilayah di Nusantara juga berpengaruh terhadap pola migrasi penduduk. Banyak orang Komering, Pasemah, dan Kerinci pergi meninggalkan daerahnya setelah terjadi intervensi militer Belanda pada abad XIX. Sebagian dari mereka dilaporkan menjadi tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertambangan atau menjadi pedagang di Semenanjung Melayu. Hal serupa juga dilaporkan tentang orang Banjar, Bugis, dan Minangkabau. Sebuah laporan menyebutkan bahwa para pedagang tekstil dan keris dari Banjar dan Kerinci menguasai pasar di wilayah tertentu, sementara di tempat lain terjadi persaingan yang keras antara pedagang Minang, Bugis, dan Banjar. Laporan lain bahkan menyebutkan, bahwa ada di antara mereka yang terlibat dalam gerakan politik yang terjadi di koloni Inggris tersebut.

Para migran ini juga memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah yang didatangi. Orang-orang dari Pasemah dilaporkan menjadi buruh pada pertambangan timah, kopi, dan ketela di Semenanjung Melayu, yang biasa banyak diisi oleh para buruh dari Cina. Ada juga yang bekerja di sawah atau kebun-kebun milik penduduk setempat. Ketika perkebunan besar karet milik perusahaan swasta asing maupun perkebunan karet rakyat berkembang sejak awal abad XX, para migran ini juga menjadi buruh di perkebunan-perkebunan karet tersebut. Para buruh dari Komering, Kerinci, dan Banjar juga ditemukan dalam sektor pertanian rakyat di berbagai tempat di Sumatera.

Ketika tekanan politik Belanda terhadap Banjarmasin dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan semakin intensif, orang Bugis dan Banjar semakin banyak yang membuka daerah rawa-rawa di sepanjang pantai timur Sumatera. Selain menjadi

nelayan, orang Banjar dan Bugis ini juga mulai membuka kebun kelapa dan lahan persawahan padi pasang surut, seperti di daerah Sungsang dan muara sungai Batanghari dan Siak. Di Pagatan di pantai selatan Pulau Kalimantan, orang Bugis dan Makassar menciptakan komunitas muslim baru. Secara ekonomis, penduduk di daerah ini tidak hanya tergantung sebagai petani dan nelayan melainkan juga sebagai pelaut dan pedagang yang memiliki hubungan dengan berbagai wilayah di Nusantara. Kesempatan ekonomi baru juga diciptakan oleh orang Bugis dan Makassar di Kepulauan Sapudi dan Kengean, sehingga sektor perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan di daerah yang kaya akan hasil laut ini berkembang dengan pesat sejak pertengahan abad XIX. Di tempat lain di Indonesia, orang Bugis dan Makassar yang tersingkir dari daerahnya karena intervensi militer dan politik Belanda telah membentuk komunitas wirausahawan muslim di Bali dan Lombok. Selain orang Cina, mereka sangat berpengaruh dalam kegiatan perdagangan dan transportasi di Bali dan Lombok pada awal abad XIX. Bersama-sama para pedagang Arab, Cina, dan kemudian Eropa para pedagang Bugis dan Makassar membeli terutama beras dan berbagai jenis komoditi yang baru dikembangkan pada waktu itu, seperti tembakau, kapas, dan kopra dari para *bandar* Cina, dan kemudian membawanya ke Singapura. Akibatnya, nilai perdagangan dari Bali dan Lombok ke Singapura mengalami kenaikan lebih dari 10% per tahun pada tahun 1830-an.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan, di samping kelompok sosial bawah, migrasi ke luar daerah juga dilakukan oleh para elit. Sebuah laporan tentang Pulau Bawean pada abad XIX menyebutkan, wirausahawan muslim yang menguasai perdagangan dan transportasi antara Pulau Bawean dengan daerah lain di Jawa Timur merupakan keluarga *kemas* yang berasal dari Palembang. Hal serupa juga dilakukan oleh sebagian elit Bugis, Makassar, maupun Banjar di tempat yang lain.

Di dalam aspek ekonomi yang lain, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi tergantung pada monopoli perdagangan atau sekedar penyerahan wajib dalam pola yang lama. Suatu pola produksi baru yang menghasilkan berbagai jenis komoditi ekspor mendapat perhatian besar dari pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk semakin memberdayakan sumber ekonomi tanah jajahan ini, sebenarnya telah dirintis oleh VOC di Periang pada masa-masa akhir keberadaannya.

Kesulitan ekonomi yang sedang terjadi di Belanda maupun di koloni pada akhir dekade ketiga abad XIX, semakin mendorong pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan ekonomi politik baru, yang dikenal sebagai *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa di koloninya. Sistem ini memang lebih dikenal di beberapa tempat di Pulau Jawa. Namun, dalam kenyataannya suatu sistem produksi yang sama juga diterapkan bagi penduduk di daerah Minangkabau, Palembang, Minahasa, dan Lampung, sedangkan penduduk di Tanah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta terbebas dari *Cultuurstelsel* ini. Berbeda dengan gambaran sebelumnya yang

menyatakan bahwa kegiatan Sistem Tanam Paksa hanya melibatkan pemerintah kolonial, dalam kenyataannya para pemodal swasta juga telah secara luas terlibat dalam usaha produksi dan pemasaran berbagai jenis komoditi ekspor pada periode itu.

Sistem Tanam Paksa mampu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah Hindia Belanda, pemerintah pusat di Belanda, maupun pengusaha swasta Belanda. Tidak kurang dari 832 juta gulden dikirim ke Belanda antar tahun 1831 dan 1877. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang menyerap banyak tenaga kerja dan tanah penduduk bumiputera sering dihubungkan dengan pemiskinan terhadap penduduk bumiputera pada waktu itu, tetapi beberapa penelitian akhir-akhir ini melihat adanya dampak, khususnya ekonomis dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa terhadap kondisi ekonomi penduduk bumiputera yang sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada letak geografis, kondisi lingkungan, jenis komoditi yang dihasilkan, pengalaman historis masing-masing daerah, maupun status sosial. Di satu daerah dilaporkan terjadi eksploitasi terhadap tanah dan tenaga kerja penduduk, sedangkan di daerah lain petani mengalami surplus produksi beras yang sangat besar, biarpun Sistem Tanam Paksa dilaksanakan di daerah tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan, sebagian besar elit lokal di tempat sistem ini dilaksanakan mendapat keuntungan yang sangat besar dari sistem yang meniru *Preangerstelsel* itu. Biarpun berbagai laporan kolonial menunjukkan adanya selisih keuntungan dalam jumlah besar yang dibayarkan kepada petani, dalam kenyataannya distribusi terhadap keuntungan ini tidak merata. Tidak mengherankan jika muncul pendapat yang menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh para elit lokal di Jawa pada abad XI, kemungkinan besar juga berasal dari hasil Tanam Paksa ini.

Memang tidak banyak yang diketahui tentang hubungan antara Islam dan ekonomi di Indonesia pada periode Tanam Paksa itu. Namun, berdasarkan potensi ekonomis yang dimiliki oleh para ulama, kyai atau pemilik pesantren yang berhubungan dengan penguasaan atas tanah dan penduduk, pelaksanaan *Cultuurstelsel* tentu saja berpengaruh terhadap ekonomi mereka. Hal ini dapat dilihat di wilayah Jawa Timur, seperti Madiun, Bojonegoro, Pasuruan, dan Besuki, daerah yang memiliki banyak pesantren dan sekaligus sebagai pusat pelaksanaan sistem ini. Begitu juga dengan di wilayah lain tempat Sistem Tanam Paksa dilaksanakan, seperti Cirebon, Periang, Pekalongan, dan Demak yang memiliki komunitas muslim yang besar.

Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menyatakan bahwa *Cultuurstelsel* tidak memiliki dampak ekonomis dalam hubungannya dengan Islam, terutama yang berhubungan dengan intensitas penggunaan tanah serta pengerahan tenaga kerja. Adanya laporan tentang perlawanan terhadap penanaman indigo oleh para petani di Pekalongan, keengganan para penanam kopi di Priangan, atau perlawanan terhadap penanaman paksa tebu di Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1830-an, nampaknya tidak dapat dipisahkan dari persaingan kepentingan antara penguasa kolonial, pemilik perusahaan swasta, atau birokrat desa dengan para elit muslim yang juga

berkepentingan dengan tanah dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan Sistem Tanam Paksa. Di samping itu, tindakan represif dalam pelaksanaan sistem itu, baik yang dilakukan oleh orang asing maupun bumiputera terhadap penduduk yang memiliki hubungan *patron-client* dengan para ulama, mendorong keterlibatan para ulama. Oleh sebab itu, keikutsertaan secara langsung para pemuka agama Islam dalam gerakan perlawanan atau pemberontakan petani yang banyak terjadi di berbagai tempat di Nusantara pada abad XIX nampaknya sulit dipisahkan dari persoalan ini. Di samping ide-ide mesianistis atau nativistis yang berasal dari tradisi lokal, Islam dan ulamanya menjadi simbol yang penting hampir pada setiap gerakan yang terjadi pada saat itu.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mendapat kecaman terutama di negeri Belanda. Hal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan sosial, politik, dan munculnya pemikiran ekonomi baru di Negeri Belanda sendiri. Kelompok liberal serta pemodal swasta berada pada posisi yang semakin penting, sehingga mampu mempengaruhi berbagai keputusan pemerintah di Belanda maupun di koloninya. Upaya untuk merubah kebijakan ini tentu saja tidak hanya didasarkan pada alasan kemanusiaan maupun karena semakin kecilnya keuntungan yang dikirim ke negeri Belanda. Rancangan tentang kebijakan baru itu tidak terlepas dari perhitungan para pemodal, bahwa koloni Belanda di Nusantara itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar jika dilakukan diversifikasi jenis usaha melalui penanaman modal yang lebih besar. Oleh sebab itu, sebuah kebijakan ekonomi baru perlu berlakukan.

Kebijakan ekonomi politik Sistem Tanam Paksa secara formal digantikan oleh kebijakan ekonomi liberal pada tahun 1870, walaupun di beberapa tempat Sistem Tanam Paksa masih terus berlangsung, bahkan sampai awal abad XX. Kebijakan baru yang juga diikuti dengan pemberlakuan peraturan pertanahan yang baru pada tahun 1870, telah memberi kesempatan yang sangat besar bagi perluasan penanaman modal oleh pemodal swasta asing, khususnya bagi individu maupun perusahaan Barat. Akibatnya, berbagai usaha perkebunan besar maupun pertambangan mulai dibuka di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lainnya. Periode akhir abad XIX ini juga ditandai dengan ekspansi ekonomi pemerintah kolonial Belanda maupun perusahaan swasta asing ke daerah-daerah yang sebelumnya belum mendapat perhatian, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kemudian juga Irian.

Perluasan penanaman modal untuk membuka perkebunan tidak hanya terjadi di koloni Belanda di Nusantara. Pada waktu yang hampir bersamaan, usaha penanaman kopi oleh perkebunan besar untuk mengganti peran perkebunan kopi rakyat juga didukung oleh pemerintah kolonial Portugis di Pulau Timor. Dalam hubungan dengan kualitas hidup penduduk bumiputera, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa selain ada perbedaan pengaruh karena perbedaan antar wilayah maupun jenis usaha seperti pada masa Tanam Paksa, maka dampak sistem ekonomi Liberal tidak lebih baik daripada Sistem Tanam Paksa.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa sampai perluasan penanaman modal swasta asing pada masa Liberal sepanjang abad XIX tidak dapat dilepaskan dari perluasan kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat Nusantara. Terlepas dari dampak kebijakan ekonomi politik itu terhadap kualitas hidup penduduk bumiputera, ekonomi di Nusantara sejak abad XIX ditandai oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat, terbentuknya ekonomi nasional, dan pengintegrasian ekonomi penduduk dengan pasar dunia. Selain itu, perluasan monetisasi dalam kegiatan ekonomi penduduk berlangsung dengan cepat, sehingga hubungan ekonomi di dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga pemerintah lebih ditentukan oleh ekonomi uang.

Perluasan penanaman modal swasta asing sejak akhir abad XIX ternyata berpengaruh terhadap komunitas muslim. Pembukaan perkebunan swasta di Besuki dan Banyuwangi di Jawa Timur pada akhir abad XIX, merupakan salah satu contoh dari perkembangan komunitas muslim di suatu wilayah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Jumlah orang Madura yang bermigrasi ke daerah ini semakin besar ketika perkebunan-perkebunan tembakau, kopi, dan tebu milik pengusaha swasta asing di buka. Kedatangan para migran ini terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perkebunan tersebut. Pada musim-musim tertentu ketika desa-desa di Madura tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk, jumlah migran ini menjadi semakin besar, terutama sejak kebijakan monopoli garam diberlakukan.

Selain memasuki wilayah perkebunan, para migran Madura ini juga menuju daerah perkotaan seperti Surabaya, yang pada waktu itu juga sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Seperti juga di kawasan perkebunan, sebagian besar dari kelompok masyarakat muslim yang berasal dari Madura ini terlibat sebagai kuli atau usaha jasa lain dengan pendapatan rendah atau menjadi pedagang kecil. Walaupun begitu, para migran ini memiliki andil yang besar dalam terciptanya usaha ekonomis baru, sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan dan pusat-pusat perkebunan. Sebagian dari para migran itu mampu memanfaatkan kesempatan ekonomi baru ini, sehingga muncul keluarga-keluarga usahawan muslim bumiputera yang berhasil. Di dalam komunitas baru yang menetap ini, selain membawa nilai-nilai lama yang mengikat, mereka juga menempatkan Islam sebagai salah satu hal yang penting di dalam berbagai kegiatan di komunitas mereka, tentu saja termasuk kegiatan ekonomi.

Sebaliknya, migrasi orang Madura ke Jawa juga menimbulkan bentuk usaha baru di kalangan penduduk di Madura. Orang Madura yang menjadi kuli atau mandor di perkebunan tembakau di Pulau Jawa, setelah kembali ke Madura mulai menanam tembakau untuk komersial. Pada tahun 1884 terdapat lebih dari 1.400 hektar lahan yang ditanami tembakau di daerah ini, dan angka ini terus naik pada awal abad XX, terutama setelah pabrik rokok BAT dan Faroka di Jawa mulai berproduksi. Namun, sampai akhir abad XIX, sebagian besar tembakau Madura dijual di pasar lokal, dan hanya sebagian kecil yang mencapai pasar tembakau di Jawa dan Bali. Di samping

itu saja menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap peran penduduk bumiputera dalam kegiatan ekonomi. Di Pulau Jawa saja yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan tempat sebagian besar penduduk bermukim, para elit tradisional tidak terlalu peduli pada kegiatan ekonomi. Para elit sudah terlalu lama menggantungkan sumber ekonomi mereka pada gaji dari penguasa kolonial. Kalaupun para elit ini mendapat keuntungan finansial yang besar dari suatu usaha ekonomi, hal itu terjadi bukan dikarenakan kegiatan ekonomi mereka secara langsung melainkan sebagai hasil dari fungsi sosial dan politik mereka di dalam masyarakat maupun birokrasi kolonial. Namun, ini tentu saja bukan gambaran keseluruhan masyarakat bumiputera di Indonesia pada masa kolonial. Beberapa bukti dari penelitian akhir-akhir ini juga membuktikan bahwa priyayi tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan perdagangan. Beberapa orang dianggap oleh masyarakatnya sebagai priyayi, namun ia juga bestatus sebagai pedagang.

Berbeda dengan gambaran umum tentang pedagang atau pengusaha bumiputera pada masa kolonial pada historiografi yang ada selama ini, dalam kenyataannya para wirausahawan muslim santri tidak kehilangan tempat mereka dalam perekonomian Indonesia di tengah-tengah gencarnya penetrasi dan superioritas kekuatan asing. Bukti-bukti yang ada tentang abad XIX dan awal abad XX secara jelas menunjukkan adanya respon rasional para wirausahawan muslim terhadap kesempatan pasar yang muncul para waktu itu. Akhir abad XIX dan dekade awal abad XX merupakan salah satu periode puncak dalam perluasan peran ekonomis kelompok wirausahawan muslim bumiputera di Nusantara. Mereka tidak hanya semata-mata terlibat dalam perdagangan, melainkan juga dalam produksi berbagai jenis barang industri yang dibutuhkan pasar dalam skala yang cukup besar untuk ukuran saat itu.

Di Kudus, para wirausahawan muslim berhasil mengembangkan industri rokok kretek *klobot* yang sangat luar biasa sejak tahun 1870-an. Sementara itu, para wirausahawan muslim di Pekalongan, Surakarta, Tasikmalaya, dan Yogyakarta menjadi pengusaha tekstil dan barang kerajinan lainnya. Kenaikan permintaan atas tembakau Madura sejak awal abad XX, meningkatkan secara cepat produksi maupun ekspor tembakau Madura. Kenaikan permintaan pasar ini tentu saja membuka kesempatan tidak hanya berkembangnya perkebunan tembakau rakyat melainkan juga jumlah para *bandol* dan *juragan* lokal. Oleh sebab itu, kota-kota atau kampung-kampung, seperti Kota Gede, Pekajangan, Kudus Kulon, Karangajen, Prawirotaman, Kauman, dan Laweyan menjadi sentra industri yang dimiliki oleh keluarga muslim bumiputera. Pada saat yang sama kelompok pedagang juga berkembang dengan pesat dalam suatu jaringan komunitas Islam, sehingga kampung *kauman* di Yogyakarta maupun Kudus tidak terpisahkan dari Balapulang di Pekalongan, Banjarmasin atau Alabio di Pulau Kalimantan, dan Padang, Bukit Tinggi, serta Palembang di Pulau Sumatera. Hal yang sama terjadi antara Parindu, Pamekasan, Surabaya, Rembang, Tuban, dan Semarang yang dihubungkan oleh jaringan para pedagang tembakau

muslim bumiputera. Sedangkan jaringan para pedagang dari Kota Gede Yogyakarta mencakup berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Tulungagung, Kediri, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, dan beberapa pusat perdagangan di pulau lainnya.

Sebagai satu kelompok sosial, para wirausahawan bumiputera ini memiliki intensitas hubungan sosial-keagamaan yang sangat kuat dengan Islam. Islam menjadi simbol yang paling penting dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan Ahmad Dahlan pendiri perserikatan Muhammadiyah merupakan contoh yang klasik. Walaupun Muhammadiyah sebagai institusi tidak pernah dijadikan Ahmad Dahlan sebagai usaha dagang, tetapi Ahmad Dahlan menggunakan jaringan ekonomi untuk kepentingan dakwahnya, dan sebaliknya jaringan dakwah dan kekerabatan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Namun, berbeda dengan wirausahawan Arab dan Cina, para wirausahawan muslim bumiputera ini tidak memiliki akses langsung kepada kekuatan ekonomi Barat yang paling menentukan pada saat itu. Banyak dari wirausahawan muslim ini memiliki ketergantungan yang besar kepada orang Cina dan Arab, atau menurut sebuah pendapat mereka cenderung bertindak sebagai *sub-collaborator* dari orang Cina dan Arab, walaupun kadang-kadang juga berkompetisi.

Biarpun pertumbuhan usaha perdagangan dan industri oleh kelompok muslim kelas menengah lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan daerah perkotaan mulai menggeser peran pedesaan dalam proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada awal abad XX, suatu hal yang salah jika menganggap bahwa memasuki abad XX kawasan pedesaan tidak lagi memiliki arti yang penting bagi komunitas muslim santri secara ekonomis. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi pergerakan nasional di kawasan perkotaan sering menyebabkan orang menyingkirkan begitu saja peran ekonomis desa bagi masyarakat muslim di Indonesia pada masa kolonial. Padahal, sumber ekonomi komunitas muslim tidak hanya berada di daerah perkotaan saja melainkan juga di daerah pedesaan. Pada awal abad XX daerah pedesaan masih memiliki komunitas muslim yang memiliki kekuatan ekonomi yang berarti, seperti para haji, petani kaya, pedagang ternak, pedagang keliling, pemilik toko, atau pemilik pesantren. Keberadaan pesantren di Pulau Jawa atau lembaga sejenis di tempat lain, jangan hanya dilihat berdasarkan otoritas sosial-keagamaan saja melainkan juga fungsi ekonominya yang masih terus berlanjut. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa ide-ide pembaharuan atau nasionalisme Indonesia tidak hanya muncul atau berkembang di dalam komunitas yang berpendidikan Barat atau perkotaan, melainkan juga pada komunitas petani, pedesaan, dan pesantren, yang ternyata tetap memelihara jaringan ke luar melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun kekerabatan.

Suatu hal yang menarik, bahwa sebagian besar para wirausahawan muslim yang berhasil di Indonesia pada masa kolonial, seperti juga orang Cina dan Arab bukan merupakan penduduk asli di tempat mereka melakukan kegiatan ekonominya. Menurut sebuah kajian, paling tidak ditemui empat kelompok persebaran wirausahawan muslim bumiputera yang sangat berperan tidak di wilayahnya sendiri pada akhir abad XIX dan



awal abad XX di Pulau Jawa. Para pedagang dari Kudus banyak ditemui di Surakarta, Banyumas, dan Kedu, sedangkan orang Kalang selain di Yogyakarta juga berperan di Banyumas dan Kedu. Kelompok ketiga, yaitu para pedagang batik dari Yogyakarta dan Surakarta yang tersebar dengan luas sampai ke kota-kota kecil di Pulau Jawa. Orang Bawean merupakan kelompok terakhir yang tersebar dengan luas tidak hanya di Surabaya, Gresik, Madiun, atau Kediri di Jawa Timur, melainkan juga mencakup Pulau Jawa secara umum dan pulau-pulau lainnya termasuk ke Semenanjung Melayu. Namun, pengelompokan persebaran ini nampaknya terlalu disederhanakan. Dalam konteks Pulau Jawa sekalipun, pengelompokan ini paling tidak telah menghilangkan jaringan ekonomi yang telah di bangun dengan kuat oleh orang Banjar, Minang, Palembang, ataupun orang Bugis dan Makassar yang berlayar dengan perahunya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Pulau Jawa maupun dengan pulau-pulau lainnya.

Di antara para wirausahawan muslim bumiputera yang berhasil melakukan kegiatan ekonomi bukan di tempatnya adalah orang Bawean. Telah disebutkan di atas, seperti juga orang Minangkabau, Banjar, Palembang, Bugis, dan Makassar orang Bawean telah menggunakan *rantau* untuk mengeruk keuntungan ekonomis. Penduduk pulau kecil di sebelah utara Gresik ini lebih banyak yang berusaha di luar pulau sejak lama, seperti dalam perdagangan beras dan candu di sepanjang wilayah antara Tuban dan Rembang pada abad XVIII. Pada tahun 1803 tercatat tidak kurang dari 1/3 dari seluruh penduduk laki-laki di pulau itu telah bepergian ke Jawa atau Semenanjung Malaya.

Pengalaman dalam kegiatan ekonomi, terutama melalui kontak dengan orang Cina dan Arab telah memberi kesempatan kepada orang Bawean untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka pada abad XIX dan XX. Respon rasional mereka ini juga dipengaruhi oleh perubahan dalam lingkungan mereka. Perubahan ini mencakup penguasaan atas tanah yang hanya dapat diselamatkan melalui keberhasilan dalam perdagangan, penanaman komoditi untuk diperdagangkan, dan Islam yang memacu penduduk agar berhasil secara ekonomis sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dan sekaligus membentuk jaringan ekonomi yang lebih luas. Menurut laporan resmi pemerintah Hindia Belanda, sekitar 75 sampai 100 orang Bawean per tahun berangkat ke Mekah pada akhir abad XIX. Pada tahun 1874 tercatat tidak kurang dari 1.000 orang dari keseluruhan 35.000 penduduk Bawean telah melakukan ibadah haji.

Keberhasilan orang Bawean dapat dilihat dalam laporan tentang Kediri dan Surabaya pada akhir abad XIX dan awal abad XX, yang menyatakan bahwa para pedagang Bawean telah mampu bersaing tidak hanya dengan para pedagang Cina melainkan juga pedagang Barat. Melalui *pondok* yang menjadi pusat kegiatan mereka, orang Bawean sejak usia remaja telah mencari kesempatan ekonomi baru dari Surabaya, Semarang, Singapura, sampai ke Makassar. Bermula sebagai kuli pelabuhan Singapura atau tukang kayu di perkebunan tembakau Deli, orang Bawean kemudian mampu meningkatkan status ekonominya, terutama setelah keberhasilannya

melaksanakan ibadah haji. Resesi ekonomi pada tahun 1930-an memang menimbulkan kegoncangan dalam jaringan perdagangan orang Bawean. Namun, menurut sensus tahun 1930 terdapat sekitar 5.000 orang Bawean dilahirkan di koloni Inggris di Semenanjung dan tercatat 136 *pondok* orang Bawean di Singapura pada tahun 1947.

Peran sebagian wirausahawan muslim bumiputera dalam perekonomian Indonesia pada masa kolonial mulai mendapat tantangan yang berarti, terutama sejak dekade kedua abad XX. Tantangan ini terutama disebabkan oleh semakin kuatnya usaha swasta Barat, keberhasilan orang Cina dan Timur Asing lainnya dalam perdagangan menengah ke bawah, perubahan pasar yang berhubungan dengan perubahan permintaan di dalam masyarakat bumiputera sendiri, semakin terbukanya pasar lokal terhadap barang impor, kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif, keterbatasan modal, tidak adanya inovasi manajemen modern dalam menjalankan usaha, krisis ekonomi dunia, sampai persoalan internal di dalam keluarga pada sebagian besar keluarga pengusaha muslim bumiputera yang telah berhasil.

Kedatangan tekstil Inggris yang lebih murah dibandingkan dengan tekstil lokal serta perubahan pola pakaian yang dikenakan, mengakibatkan persoalan serius bagi para pengusaha tekstil tradisional di Surakarta, Pekalongan, atau pun Yogyakarta. Permintaan terhadap *batik* dan *lurik* menjadi berkurang, karena masyarakat mulai memilih memakai pakaian dari katun yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di Eropa atau India. Keadaan menjadi semakin sulit karena para pengusaha tekstil tradisional sangat tergantung pada bahan yang disediakan oleh pedagang asing. Walaupun nasibnya lebih baik daripada *batik* Jambi yang telah hancur seiring dengan perluasan pengaruh kolonial Belanda, para pengusaha *songket* Palembang atau kain sejenis di Lampung dan Bengkulu mengalami kesulitan yang besar memasuki abad XX. Penduduk hanya membutuhkan tekstil tradisional untuk kegiatan upacara dalam jumlah yang terbatas, sedangkan untuk pakaian sehari-hari lebih mengutamakan tekstil impor. Sarung impor telah mengganti kain lokal yang memiliki fungsi yang sama, sehingga kain Bugis dan Banjar yang lebih mahal mulai ditinggalkan oleh sebagian besar konsumennya yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah.

Krisis serupa dialami oleh pengusaha rokok muslim bumiputera di Kudus. Perusahaan rokok kretek *klobot* yang diusahakan pengusaha muslim bumiputera harus bersaing dengan perusahaan rokok sejenis milik orang Cina, yang berhasil mengembangkan usaha mereka di Jawa Timur. Padahal, sebelumnya para pengusaha Cina ini terdesak keluar oleh pengusaha bumiputera dari Kudus, terutama sejak huru hara tahun 1918. Penggunaan mesin dalam industri rokok dan munculnya usaha rokok putih oleh pengusaha Cina dan Barat semakin mempersulit para pengusaha rokok muslim bumiputera pada tahun 1930-an. Jenis rokok yang baru ternyata lebih ekonomis dan lebih disukai para konsumen. Selain itu, masuknya berbagai jenis barang impor yang lain juga menimbulkan kesulitan bagi para pengusaha muslim bumiputera ini. Di Jawa Barat para pengusaha bordir atau perajin anyaman harus bersaing dengan

produk dari luar, hal yang sama dihadapi para pengusaha cor besi di Tegal Jawa Tengah. Krisis ekonomi tahun 1930-an semakin memperburuk usaha kelompok wirausahawan muslim bumiputera.

Di tengah-tengah pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para wirausahawan muslim bumiputera ini, sejak awal abad XX muncul usaha untuk mengkonsolidasi kekuatan yang ada dalam satu wadah organisasi. Pembentukan Sarikat Dagang Islam di Betawi pada tahun 1909 dan kemudian di susul oleh Sarekat Dagang Islam di Surakarta pada tahun 1911, merupakan salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perubahan sosial-politik yang berhubungan dengan kebangkitan gerakan nasionalis Indonesia segera mempengaruhi organisasi ekonomi kelompok menengah santri ini. Sarikat Dagang Islam yang didirikan di Surakarta segera berubah menjadi gerakan kebangsaan, terutama sejak namanya diubah menjadi Sarikat Islam pada tahun 1913. Para pengurus organisasi ini tidak lagi dimonopoli oleh para wirausahawan muslim bumiputera, melainkan telah dimasuki kelompok priyayi, militer, maupun petani. Orientasi organisasi ini tidak lagi hanya terbatas pada bidang ekonomi, melainkan telah berkembang lebih luas mencakup aspek sosial, hukum, maupun politik.

Satu hal yang perlu diperhatikan, pada awalnya keberadaan Sarikat Islam sering dihubungkan dengan persaingan ekonomi antara wirausahawan muslim bumiputera dengan orang asing, terutama orang Cina. Oleh sebab itu, keterlibatan Sarikat Islam dalam gerakan anti Cina di Surakarta, Kudus dan wilayah lain di Pulau Jawa antara tahun 1913 dan 1918 sering dihubungkan dengan persaingan ekonomi ini. Padahal terdapat bukti-bukti yang kuat, ternyata masing-masing kelompok tidak selalu bersaing dalam usaha yang sama, termasuk persoalan yang menyangkut pedagang dan pengusaha batik muslim bumiputera di Surakarta yang sering dijadikan dasar awal gerakan anti Cina oleh Sarikat Islam. Selain itu di Palembang misalnya, sebuah usaha penerbitan yang secara jelas mengatasmakan sebagai bagian dari Sarikat Islam ternyata mendapat modal dan dijalankan oleh kelompok menengah santri yang bekerjasama dengan orang Cina. Bahkan suatu hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan, terdapat bukti bahwa orang Cina juga menjadi anggota Sarikat Islam di beberapa tempat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi dari kegiatan Sarikat Islam tidak hanya terbatas pada persaingannya dengan orang Cina melainkan lebih kompleks lagi. Orientasi ini mencakup kesempatan ekonomi bagi penduduk bumiputera yang terbatas atau bahkan tertindas dalam masyarakat kolonial, yang tidak hanya melibatkan orang Cina melainkan orang Timur Asing lainnya termasuk orang muslim Arab, pengusaha swasta asing Barat, penguasa kolonial, dan tentu saja para elit bumiputera.

Kelompok wirausahawan muslim juga terlibat dalam pembentukan koperasi. Pada tahun 1934, para pengusaha tekstil di Pekajangan mendirikan koperasi yang menghimpun orang muslim yang menjadi pengusaha batik. Koperasi serupa juga

dibentuk oleh para pengusaha rokok kretek di Kudus pada tahun 1937. Di beberapa tempat di pulau-pulau lain, organisasi sejenis juga didirikan bahkan lebih dahulu daripada di Jawa, seperti di Palembang, Padang, dan Kepulauan Riau. Pembentukan lembaga ekonomi seperti ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh kelompok muslim yang berada di perkotaan. Kelompok muslim yang berbasis di pedesaan atau di pesantren juga melakukan kegiatan yang sama, seperti pembentukan *Lajnah Waqfiyyah* pada tahun 1930 dan *Syirkah Mu'awanah* pada tahun 1937 di Jawa Timur.

Bersamaan dengan berkembangnya wirausahawan muslim bumiputera dalam bidang perdagangan dan industri, sebuah kelompok baru yang kuat secara ekonomi muncul di tengah-tengah komunitas petani muslim di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Seperti para pedagang dan pengusaha muslim bumiputera yang sukses, para petani ini juga menempatkan Islam sebagai simbol penting di dalam komunitas mereka. Perkembangan perkebunan rakyat yang pesat di Sumatera dan Kalimantan sejak akhir dekade pertama abad XX, terutama di daerah penghasil karet di Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi telah meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan munculnya komunitas petani kaya sampai jauh ke daerah pedesaan. Di samping karet, perkebunan kopi dan lada rakyat juga memiliki peranan yang sama di beberapa daerah, seperti Bengkulu, Kerinci, Lampung, dan dataran tinggi Palembang. Selain itu, mungkin tidak pernah dibayangkan bahwa perkembangan perkebunan rakyat milik para pekebun muslim santri ini mampu mempengaruhi atau bersaing dengan usaha pertambangan maupun perkebunan besar swasta asing yang memiliki modal yang sangat besar, terutama dalam hal tenaga kerja. Perkebunan besar maupun pertambangan milik perusahaan swasta asing mengalami kesulitan untuk mencari tenaga kerja, atau harus menghadapi kenyataan bahwa para buruh mereka banyak yang melarikan diri ke kebun-kebun kecil milik penduduk setempat.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa perluasan perkebunan rakyat, terutama karet bukan merupakan bagian dari kebijakan penguasa kolonial melainkan sebagai respon rasional penduduk terhadap kesempatan pasar. Selain itu, keinginan untuk menunaikan ibadah haji nampaknya merupakan salah satu faktor yang memotivasi para petani tersebut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Hubungan ekonomi tradisional dengan Semenanjung Melayu dan peran ekonomis para jemaah haji memiliki fungsi yang penting dalam perluasan perkebunan karet rakyat ini. Mereka yang membawa bibit maupun teknologi ke pedesaan Sumatera dan Kalimantan, dan kemudian dikembangkan oleh penduduk setempat. Berbeda dengan anggapan umum, perluasan perkebunan karet rakyat di Kalimantan dan Sumatera ternyata memerlukan modal juga. Pada satu dekade pertama perkembangannya, para pekebun kecil ternyata harus membeli bibit dari para pedagang, yang kemudian ditanami di kebun-kebun mereka yang baru dibuka. Selain itu, cukup banyak jumlah pekebun kecil yang membuka kebun karet mereka di luar wilayah adatnya, sehingga mereka harus membayar "sewa" atas lahan yang dibuka. Begitu juga karena

keterbasan tenaga kerja, para pemilik kebun harus membayar secara tunai atau berbagi hasil dengan para penyadap yang sebagian besar datang dari luar daerah dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu saja mengurangi bagian yang diterima oleh para pemilik kebun.

Kemakmuran menjadi ciri pusat-pusat perkebunan rakyat di Sumatera dan Kalimantan, terutama pada tahun 1920-an. Para pekebun ini mampu membangun rumah besar dan mahal, membeli berbagai jenis barang impor seperti tekstil, sepatu, mesin jahit, sepeda, sepeda motor, dan bahkan mobil. Dalam hubungannya dengan Islam, jumlah penduduk dari pusat penghasil karet, lada, dan kopi rakyat yang menunaikan ibadah haji ke Mekah mengalami kenaikan yang pesat. Pada tahun 1910-an pada saat ledakan produksi karet pertama terjadi, tidak kurang dari 200 orang per tahun yang pergi ke Mekkah dari daerah penghasil karet di Jambi, namun pada tahun 1920 saja terdapat lebih dari 1.000 orang yang pergi ke Mekkah dari Jambi. Menurut data resmi dari pemerintah, lebih dari 25.000 orang telah berangkat ke Mekkah dari Palembang dan Jambi antara tahun 1923 dan 1929. Sebuah laporan bahkan menyebutkan bahwa pada saat harga karet tinggi di pertengahan tahun 1920-an, tidak kurang dari 75 orang penduduk dari sebuah *marga* penghasil karet di Palembang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada periode yang sama, kurang lebih 10.000 orang per tahun pergi ke Mekah dari Kalimantan Selatan. Jumlah orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekah ini segera menurun ketika harga karet, lada, dan kopi rakyat menurun pada masa depresi. Peningkatan jumlah penduduk yang menunaikan ibadah haji menyebabkan pemerintah kolonial menuduh penduduk bumiputera melakukan pemborosan, dan tidak berusaha menggunakan hasil dari kebun mereka untuk usaha yang lebih produktif. Hal ini tentu saja berhubungan dengan kenyataan, setiap orang memerlukan tidak kurang dari 1.000 gulden untuk membiayai perjalanan hajinya. Padahal, perkembangan perkebunan memberikan sumbangan finansial yang sangat besar kepada pemerintah kolonial, terutama sejak diberlakukannya pajak ekspor khusus bagi karet rakyat pada tahun 1930-an. Kondisi seperti ini terjadi juga di beberapa tempat di Jawa, ketika para petani kecil muslim di Besuki dan Kedu mendapat keuntungan yang cukup besar dari usaha pengembangan tanaman tembakau rakyat.

Berbeda dari sebagian besar para pedagang atau pengusaha yang telah digambarkan di atas, para petani kaya ini cenderung tidak memanfaatkan proses menunaikan ibadah haji untuk membentuk jaringan ekonomi baru. Sebagian dari mereka memang ada yang menetap untuk jangka waktu yang lama di Mekkah atau mengirimkan anak mereka untuk belajar di berbagai pusat pengkajian Islam di Sumatera, Jawa, Asia Barat maupun Afrika Utara, tetapi jaringan itu lebih bersifat ikatan sosial-keagamaan dan mengesampingkan fungsi ekonomisnya. Di samping itu, sebagian besar pendapatan yang diterima selama periode puncak tidak sempat diinvestasikan kembali ke dalam usaha produktif. Diversifikasi kegiatan ekonomi di

kalangan para petani yang berhasil ini sangat terbatas. Walaupun terdapat bukti adanya usaha para petani ini mengembangkan industri kecil, usaha tersebut tidak dapat berkembang karena berbagai faktor. Hal ini besar kemungkinan berhubungan dengan jumlah pendapatan yang diterima tidak terlalu besar, dan masa puncak yang sangat pendek. Akibatnya, ketika nilai produksi dari kebun mereka menurun akibat fluktuasi pasar dunia, maka usaha ekonomi alternatif yang menguntungkan belum terbentuk. Para petani muslim yang sebagian sudah menjadi haji ini memang tidak terlalu terpuruk ketika krisis ekonomi terjadi, tetapi keberhasilan mereka dalam waktu yang pendek itu belum mampu menimbulkan perubahan secara struktural di dalam masyarakatnya.

Di samping menciptakan para petani kaya, perluasan perkebunan rakyat di beberapa wilayah juga mampu menciptakan kelas menengah muslim santri dan mempertahankan keberlanjutan peran pedagang muslim bumiputera dalam kegiatan perekonomian wilayahnya. Para pedagang perantara yang membeli hasil perkebunan rakyat di Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan juga terdiri dari para pedagang bumiputera, tentu saja di samping pedagang Arab dan Cina. Pedagang bumiputera yang dikenal dalam "Saudagar Padang-Palembang" membeli hasil perkebunan rakyat, seperti kopi, karet, lada, rotan, dan kopra di Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Palembang dari para pedagang bumiputera setempat, dan kemudian diekspor ke Betawi, Singapura, dan bahkan Filipina. Hal serupa dilakukan oleh Raja Haji Ahmad dan Raja Haji Ali dari Sarikat Dagang Ahmadi, yang mengeksport kelapa dari Riau ke Singapura, dan membawa berbagai jenis barang kebutuhan dari Singapura untuk dijual kepada penduduk di kepulauan Riau. Hanya dalam hubungannya dengan karet rakyat, para pemilik pabrik pemrosesan kembali dan pengiriman karet ke Singapura yang menjadi pasar utama karet rakyat, lebih didominasi oleh para pedagang Cina. Hal ini tidak mengherankan karena pemilik modal besar dan pemilik pabrik pemrosesan kembali karet rakyat di Kalimantan, Sumatera, dan Singapura hampir keseluruhannya adalah orang Cina. Walaupun begitu, sebuah manifestasi pengiriman karet dari pelabuhan Jambi pada tahun 1920-an menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak nama-nama pedagang bumiputera yang mengirimkan karet ke Singapura.

Di tengah-tengah keberhasilan itu, para pedagang muslim bumiputera harus menghadapi tantangan yang besar akibat berbagai perubahan yang terjadi pada waktu itu. Salah satu faktor adalah perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi. Perkembangan jalur kereta api Kertapati-Panjang, jalan raya sepanjang Pulau Sumatera, dan pelayaran dengan kapal bermesin pada tahun 1920-an, merupakan contoh klasik yang memperkecil kesempatan ekonomi bagi para pedagang muslim bumiputera. Hasil produksi suatu daerah tidak lagi dibawa melalui pasar-pasar yang dikuasai oleh para pedagang muslim bumiputera, melainkan melalui pasar terdekat dengan jalur kereta api atau jalan raya yang tidak melewati daerah para pedagang

muslim bumiputera. Akibatnya, pusat-pusat perdagangan tradisional para pedagang bumiputera menjadi terpencil dan bahkan mati. Di samping itu, kapal-kapal milik *Koninklijke Pakertvaart Maatschappij* (KPM), telah menjadi pesaing perahu penduduk bumiputera dalam pelayaran lokal maupun antar pulau. Biar pun perahu-perahu Bugis masih terus memainkan peran tradisionalnya dalam pelayaran antar pulau terutama antar pelabuhan kecil, kesempatan untuk mengembangkan usaha tetap terbatas atau bahkan mulai tergeser.

Pada saat yang sama, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi ini semakin mempermudah dan mempercepat masuknya pengaruh pedagang asing sampai jauh ke pedalaman. Padahal, hal ini sebelumnya hanya menjadi monopoli para pedagang bumiputera muslim, baik penduduk setempat maupun orang dari luar. Ketergantungan para pedagang muslim bumiputera dengan pasar dan modal yang dikuasai oleh para pedagang asing, semakin mempersempit peran ekonomi mereka. Selain itu, perluasan kesempatan pendidikan Barat, kesempatan kerja pada birokrasi kolonial, perusahaan asing, dan profesi lainnya bagi penduduk bumiputera telah memalingkan perhatian penduduk bumiputera dari sektor perdagangan dan usaha ekonomi lainnya. Koran, majalah, atau terbitan lain milik penduduk bumiputera, sejak tahun 1920-an tidak lagi hanya berbicara tentang eksploitasi ekonomi oleh pemerintah kolonial serta dominasi orang asing dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Koran-koran itu semakin prihatin terhadap berkurangnya perhatian penduduk bumiputera menjadi wirausahawan. Para anggota keluarga wirausahawan bumiputera, khususnya kelompok muslim santri satu persatu lebih memilih menjadi pegawai atau profesi lainnya yang jauh dari perdagangan, industri, dan usaha ekonomi lainnya.

Kehadiran orang Jepang secara luas dalam kegiatan perekonomian Nusantara paling tidak sejak 1905 telah memberikan ciri lain dalam peran wirausahawan muslim bumiputera, di tengah-tengah dominasi pemerintah kolonial, perusahaan swasta Barat, orang Cina, dan orang Timur Asing lainnya. Segera setelah Sarekat Islam dibentuk, berbagai cabang maupun anggota Sarekat Islam memiliki hubungan ekonomi khusus dengan para pengusaha Jepang. Hubungan ini semakin dipererat dengan adanya persaingan ekonomi antara orang Cina dengan Jepang maupun antara penduduk bumiputera dengan orang Cina. Sarekat Islam di Muntilan Jawa Tengah misalnya, telah memiliki mesin tenun maupun kebutuhan benang melalui pedagang Jepang. Dalam perkembangan kemudian, para wirausahawan muslim bumiputera ini tidak hanya menjadi pedagang seperti sebelumnya, mereka terlibat dalam bidang industri dan bisnis yang lebih besar.

Setelah Perang Dunia I, hubungan antara wirausahawan bumiputera dengan pengusaha Jepang yang saling menguntungkan ini semakin berkembang. Berbagai barang dari Jepang selain dijual melalui "toko Jepang" juga disalurkan melalui para pedagang bumiputera, terutama para pedagang muslim santri termasuk orang Arab. Hal ini mampu menyaingi pedagang Cina, yang lebih banyak menjual barang-barang

dari Barat. Secara bersama-sama beberapa orang pedagang dari Sumatera berhasil menerobos monopoli perdagangan tekstil oleh orang Cina pada awal tahun 1930-an, dengan cara memasukkan tekstil Jepang ke Indonesia. Beberapa usaha dagang atau koperasi milik organisasi Islam seperti *Syirkah Mu'awanah* milik Nahdatul Ulama dan *Sarikat Dagang Ahmadi* yang didirikan oleh anggota Rusydiah Club di Kepulauan Riau memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan pengusaha Jepang. Hubungan ini tidak hanya berhenti di Indonesia. Para pengusaha bumiputera muslim juga secara teratur melakukan hubungan dagang dengan Jepang, serta membuka kantor dagang mereka di berbagai kota di Jepang, seperti Tokyo dan Yokohama.

Di samping beberapa keluarga wirausahawan muslim bumiputera yang lain, keberhasilan para wirausahawan muslim bumiputera yang berhasil pada masa kolonial Belanda, seperti keluarga Ajoeb Rais, Moeridan, Agoes Moesin Dasaad, Djohor Soetan Papatih, Abdul Ghany Aziz, dan Djohan Soetan Soelaiman, Rahman Tamin, dan Achmad Bakrie tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan mereka bersaing dengan para pengusaha Barat dan Cina melalui hubungan bisnis dengan orang Jepang. Peran penting dalam bidang ekonomi ini terus dipertahankan oleh para wirausahawan muslim bumiputera pada masa pendudukan Jepang, dan bahkan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Ketika pemerintah Republik Indonesia berusaha mengembangkan peran pengusaha bumiputera ditengah-tengah masih dominannya ekonomi kolonial pada tahun 1950-an, para pengusaha yang berasal dari komunitas muslim inilah yang menjadi salah satu kelompok penting dalam jaringan ekonomi nasional. Satu hal lain lagi yang menarik, pemikir, birokrat dan pelaku ekonomi dalam tataran pemerintahan pada dekade awal kemerdekaan Indonesia sebagian besar juga berasal dari komunitas muslim santri.

## Penutup

Melalui pemahaman bahwa sejarah adalah sejarah masyarakat, berbagai aspek sosial dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan Islam berhasil diungkap. Keberadaan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Keterkaitan antara Islam dengan aktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada masa awal persebaran Islam di kepulauan Indonesia, melainkan telah menjadi bagian yang integral dengan struktur sosial masyarakat pada masa-masa berikutnya. Keberadaan kekuasaan politik, kekuatan ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural Barat yang kemudian direpresentasi secara dominan oleh kolonialisme dan kapitalisme ternyata tidak menggeser begitu saja relasi antara Islam dan kegiatan ekonomi.

Di dalam komunitasnya, Islam dan ekonomi membentuk pola interaksi yang beragam mengikuti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Satu hal yang menarik, kehancuran Islam sebagai institusi politik bersamaan dengan perluasan pengaruh kekuatan politik dan ekonomi Barat, ternyata membuka kesempatan



munculnya kelompok interpreneur muslim bebas. Jika pada masa kerajaan-kerajaan Islam pembentukan kapitalisme pedagang bebas di dalam masyarakat lokal harus menghadapi berbagai kendala. dalam kenyataannya para pedagang dan pengusaha muslim bebas muncul sebagai kekuatan ekonomi penting pada masa kolonial. Para santri pedagang atau pengusaha itu di dalam komunitasnya tidak hanya mampu melakukan akumulasi kapital dan diversifikasi usaha, mereka juga menjadi kelompok pesaing utama yang muncul dari dalam masyarakat bumiputera terhadap dominasi ekonomi asing.

Akan tetapi, akar persoalannya tidak hanya sekedar pada etos kerja yang didasarkan agama seperti yang dikatakan Marx Weber, melainkan sebuah warisan struktural dan historis. Tidak seperti yang selama ini digambarkan dalam historiografi konvensional, dalam banyak hal perilaku ekonomi para santri itu ternyata tidak berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan, jika ditemukan banyak bukti tentang para haji yang melakukan bisnis peminjaman uang yang menuntut bunga yang tinggi, atau para santri yang memasukkan batu, kayu dan berbagai kotoran lain ke dalam karet yang mereka hasilkan untuk mendapatkan barang yang ditimbang lebih berat. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan realitas yang paling resen, ketika sekelompok masyarakat yang dikenal berada di lingkungan komunitas santri di Yogyakarta merasa berhak untuk memproduksi dan menjual sebuah merek dagang tanpa harus membayar *royalty*, karena merek dagang tersebut mampu memberikan keuntungan ekonomis yang sangat besar.

Akhirnya, sebagai sebuah realitas sosial, Islam seperti realitas sosial lainnya merupakan bagian dari proses historis masyarakatnya. Hal itu berarti, sebagai realitas sosial dan realitas historis, agama bukan sesuatu yang sakral. Oleh sebab itu, merupakan suatu kesalahan yang besar jika secara historiografis Islam direduksi hanya memiliki fungsi teologis yang tidak ada hubungannya dengan unsur ekonomis atau sosiologis. Kenyataan historis yang berkaitan dengan agama Budha di Burma dan Katholik di Filipina menunjukkan sulitnya membedakan kekayaan keagamaan dengan kekayaan duniawi. Ketika tanah dan produksi dalam struktur ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari *sangha* dan *ordo*, agama dan ekonomi telah terikat secara struktural sebagai suatu sistem sosial yang saling mempengaruhi. Upaya untuk melakukan reformasi agraria bukan hanya harus berhadapan dengan "tuan tanah abangan" yang tidak mau menyerahkan tanahnya, melainkan juga terhalang oleh struktur sosial keagamaan yang sudah terbentuk di dalam masyarakat dan para "tuan tanah santri" secara pribadi. Hal serupa tentu saja terjadi di dalam sejarah Indonesia. Agama seolah-olah menjadi tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan individu atau kelompok yang bertindak sebagai *homo economicus*. Hal itu berarti, pemanfaatan agama untuk kepentingan ekonomis merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Dalam kerangka objektivitas historis, bukankah rekonstruksi sejarah yang baik adalah rekonstruksi masa lalu yang berwajah manusiawi!

## DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bambang Purwanto, "The Economy of the Native Population of Southern Sumatra between 1850 and 1910", *RIMA*, vol.27, 1993.
- Berg, L.W.C. van den, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS, 1989.
- Boeke, J.H., *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1953.
- Booth, Anne et al. (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Breman, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja. Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Campo, J.N.F.M.A, "Perahu Shipping in Indonesia 1870-1914", *RIMA*, vol.27, 1993.
- Castles, Lance, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa. Industri Rokok Kretek Kudus*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Clarence-Smith, W.G., "Planters and Smallholders in Portuguese Timor in the Nineteenth and Twentieth Centuries", *Indonesia Circle*, No.57, 1992.
- Collombijn, Freek, "Patches of Padang. The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space", Leiden: Academisch Proefschrift de Rijksuniversiteit te Leiden, 1994.
- Cribb, Robert, ed., *The Late Colonial State in Indonesia. Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880- 1942*, Leiden: KITLV Press, 1994.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Dobbin, Christine, *Islamic Revivalism in Changing Peasant Economy. Central Sumatra. 1784-1847*, London: Curzon Press, 1987.

- , "The Important of Minority Characteristics in the Formation of Business Elites on Java: The Baweanese Example, c.1870-c.1940", *Archipel*, 41, 1991.
- Edward L. Poelinggomang, "Proteksi dan Perdagangan Bebas Kajian Tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19". Amsterdam: Academisch Proefschrift de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1991.
- Elson, R.E., *Village Java under the Cultivation System 1830-1870*, Sydney: Allen & Unwin, 1994.
- Fernando, M.R. & Bulbeck, David (eds.), *Chinese Economic Activity in Netherlands India*, Singapore: ISEAS, 1992.
- Furnivall, J.S., *Netherlands India. A Study of Plural Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1944.
- Hanna, Willard A., *Hikayat Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Jonge, Huub de, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Korver, A.P.E., *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, Jakarta: Grafiti, 1985.
- Kraan, Alfons van der, "Bali and Lombok in the World Economy, 1830-50", *RIMA*, vol.27, 1993.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam. Interpretasi untuk Aksi*, Jakarta: Mizan, 1991.
- Lindblad, J.Th., *Between Dayak and Dutch. The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*, Dordrecht: Foris Publication, 1988.
- , ed., *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*, Leiden: Programme of Indonesian Studies, 1993.
- , ed., *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia. 1890s-1990s*, Amsterdam: KNAW, 1996
- Muhammad Gade Ismail, "Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942", Leiden: Academisch Proefschrift de Rijksuniversiteit te Leiden, 1991.

- Nagazumi, Akira, ed., *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Nagtegall, Luc, *Riding the Dutch Tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java. 1680-1743*, Leiden: KITLV Press, 1996.
- Post, Peter, "The Formation of the Pribumi Business Elite in Indonesia, 1930s-1940s", Peter Post & E. Touwen-Bouwisma, eds., *Japan Indonesia and the War. Myths and Realities*, Leiden: KITLV Press, 1997.
- Reid, Anthony, ed., *Southeast Asia in the Early Modern Era. Trade, Power, and Belief*, Ithaca: Cornell University Press, 1993.
- Ricklefs, M.C., *War, Culture and Economy in Java 1677-1726*, New South Wales: Allen & Unwin, 1993.
- Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java. A Study of Agrarian Unrest in the 19th and 20th Centuries*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- Schrike, B., *Indonesian Sociological Studies*, The Hague: W. van Hoeve Publisher, 1966.
- Vredenburg, J., *Bawean dan Islam*, Jakarta: INIS, 1990.
- Warren, J.F., *The Sulu Zone. 1768-1898*, Singapore: Singapore University Press, 1981.
- Wertheim, W.F., *Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change*, Bandung: Sumur Bandung, 1956.